

**PERILAKU MEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015  
(STUDI PADA ANGGOTA IPNU DAN IPPNU KECAMATAN  
KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO)**

**Dyah Nur Khafifah**

12040254238 (S1 PPKn, FISH, UNESA) dyahnurkhafifah@gmail.com

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmokoadi@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih (anggota organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung) dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam kategori pemilih rasional objektif yang dinyatakan dalam lima indikator, yaitu informasi yang dimiliki terkait seluruh kandidat peserta pemilu, dapat mengambil keputusan saat dihadapkan pada alternatif pilihan, memiliki prinsip dalam menentukan pilihan pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015, melakukan penilaian terhadap seluruh kandidat peserta pemilu, dan memiliki tujuan dan motivasi untuk kepentingan umum. Sebanyak 14% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam kategori pemilih rasional yang subjektif yang dinyatakan dalam empat indikator, yaitu memiliki tujuan/kepentingan individu atau kelompok dalam menentukan pilihan pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015, memaksimalkan keuntungan, informasi dan pengetahuan terkait kandidat peserta pemilu terbatas, serta pertimbangan untung dan rugi. 49% anggota IPNU dan IPPNU termasuk dalam kategori pemilih ketiga, yaitu termasuk dalam kategori pemilih dengan pendekatan psikologis, karena memiliki nilai yang sama besar pada kedua subvariabel (rasional objektif dan rasional subjektif) atau sama rendah pada kedua subvariabel.

**Kata kunci:** perilaku memilih, Pilkada, IPNU-IPPNU.

**Abstract**

The purpose of this study is to find a tendency behavior of voters (a member of a IPNU and IPPNU district of Krembung) in determining the choice in election Sidoarjo 2015. Behavior choose was a series of activity carried out by voters before determine the choice in the election that was held. This research adopting quantitative with the methods descriptive. Technique data collection used is chief and documentation. The result showed that 37% IPNU members and IPPNU in Sidoarjo Krembung district in the category of rational objective voters expressed in five indicators, which is owned by relevant information all candidates contesting, judge when faced with to choose, having its in determining voting in the election district Sidoarjo 2015, assess all candidates contesting, and has objective and motivation for public interest. A total of 14% IPNU members and IPPNU in Krembung in the category of voters rational subjective expressed in four indicators, that is having purpose/interests of an individual or group in determining voting in the election Sidoarjo 2015, maximize shareholder profit, information and knowledge related to candidates limited, and consideration risk and reward. 49% IPNU members and IPPNU category in a third voters, which is included in a category voters with psychological approach, having equal value large on both subvariables (rational objective and rational subjective) as low as both subvariables.

**Keyword:** voting behavior, district election, IPNU-IPPNU.

**PENDAHULUAN**

Agama dan politik adalah dua hal yang berbeda, walaupun tidak jarang partai politik memanfaatkan agama sebagai kendaraan politik mereka dalam memperoleh kekuasaan dan legitimasi dari rakyat. Penggunaan agama sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan bukan pertama kali muncul dalam praktik demokrasi di Indonesia pada era reformasi saat ini. Hal

ini juga terjadi sejak era orde baru, dimana agama merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku pemilih. Terdapat sejumlah penelitian menunjukkan agama pemilih memiliki korelasi nyata dengan perilaku memilih. Agama juga dijadikan sebagai modal untuk meraih suara pemilih yaitu melalui kelompok-kelompok keagamaan (Nursal, 2004:80).

Liddle dan Mujani (dalam Nursal, 2004:86) menyatakan bahwa pengaruh politik aliran dalam

perilaku memilih di Indonesia sudah mulai memudar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok aliran misalnya agama, melalui kelompok keagamaannya masih memberikan pengaruh terhadap perilaku pemilih anggota kelompoknya. Misalnya kelompok keagamaan Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki anggota sekitar 86 juta jiwa, besarnya pengikut NU mendorong dan menarik niat berbagai pihak untuk mengambil keuntungan politis (Noor dkk., 2012:79).

Nahdlatul Ulama (NU) menurut Turmudi (dalam Sobacha 2012), adalah organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara ortodoksi Islam yang dipegang oleh kebanyakan ulama Indonesia, yakni ortodoksi *ahlussunnah wal Jama'ah* dan umat islam yang mengikuti ortodoksi ini biasa disebut dengan kaum Sunni. Amalan keagamaan NU lebih merujuk kepada Imam Syafi'i daripada imam yang lain. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama memiliki peranan yang penting dalam perkembangan politik di Indonesia. Setelah lengsernya K.H Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, perolehan suara partai NU dalam pemilu Legislatif semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh semakin terbukanya ruang politik bagi rakyat, sosialisasi politik dan komunikasi politik di masyarakat, serta kader-kader politisi NU juga telah tersebar ke dalam berbagai partai politik. Berikut ini merupakan data perolehan suara partai politik berbasis NU pada Pileg 1999-2014 berdasarkan data KPU:

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik Berbasis NU dalam Pileg 1999-2014

Partai Politik	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
PKB	13.336.982	12.002.885	5.146.302	11.298.957
PNU	679.179	-	-	-
Masyumi	456.718	-	-	-
PKU	300.064	-	-	-
P. Suni	180.167	-	-	-
Masyumi Baru	152.589	-	-	-
PPNU	-	890.98	-	-
PKNU	-	-	1.527.509	-
PNU	-	-	146.831	-
PBB	2.049.708	2.965.040	1.864.642	1.825.750
<b>Jumlah</b>	<b>17.155.407</b>	<b>14.967.925</b>	<b>8.685.284</b>	<b>13.124.707</b>

Sumber: KPU.go.id

Nahdlatul Ulama dalam perkembangannya memiliki beberapa organisasi yang berada di bawahnya, seperti Ansor, Fatayat, Muslimat, dan IPNU-IPPNU. Subyek kajian dalam penelitian ini adalah anggota organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang merupakan banom Nahdlatul Ulama yang menaungi para pemuda NU. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan yang beranggotakan anak-anak muda, dimana IPNU dan PPNU memiliki anggota dengan rentang usia 12-27 tahun.

IPNU dan IPPNU yang yang dipilih sebagai responden adalah anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung, karena organisasi ini memiliki anggota terbanyak se-Kabupaten Sidoarjo menurut data potensi PC. IPNU-IPPNU Sidoarjo jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Anggota IPNU dan IPPNU Kec. Krembung mencapai 170 orang. Selain itu menurut salah satu anggota IPPNU, IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memiliki hubungan yang erat dengan alumni-alumni organisasi yang memiliki konektivitas dengan kader-kader NU di pemerintahan, sehingga biasanya dijadikan pintu masuk yang menguntungkan bagi pasangan calon yang akan mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. Data Anggota PC. IPNU-IPPNU Sidoarjo

No.	Pimpinan Anak Cabang	Jumlah Anggota	Pimp. Ranting
1	Balong Bendo	50	20
2	Buduran	-	15
3	Candi	70	24
4	Gedangan	75	15
5	Jabon	60	15
6	Krembung	170	19
7	Krian	45	22
8	Porong	55	19
9	Prambon	65	20
10	Sedati	130	16
11	Sidoarjo	45	24
12	Sukodono	60	19
13	Taman	65	24
14	Tanggulangin	70	19
15	Tarik	-	20
16	Tulangan	-	22
17	Waru	60	17
18	Wonoayu	70	23

Sumber: Data PC. IPNU-IPPNU Sidoarjo

Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki perilaku memilih tertentu sebagai anggota dari suatu organisasi. Perilaku memilih adalah "serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y" (Surbakti, 1992:145). Perilaku memilih dapat diidentifikasi dalam tiga pendekatan (dalam Nursal, 2004:54-68): (1) pendekatan sosiologis; (2) pendekatan psikologis; (3) pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal, informal dan yang lain dapat memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Pendekatan sosiologis memiliki tiga tipe utama dalam pengelompokan sosial yaitu, (a) kelompok kategorial, yaitu terdiri dari orang-orang yang memiliki beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. (b) kelompok sekunder yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama dan menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, bahkan berusaha untuk menunjukkan kepentingan kelompoknya. (c) kelompok primer yang terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Kelompok ini memiliki pengaruh paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang” (Nursal, 2004:56-58).

Pendekatan psikologis, dalam pendekatan ini, sosialisasi yang menentukan perilaku memilih dan orientasi pada pilihan-pilihan politik seseorang bukan karakteristik sosiologis. Pendekatan psikologis ini sikaplah yang paling menentukan. Sikap yang muncul berawal dari informasi-informasi yang diterima seseorang serta merupakan hasil sosialisasi yang berlangsung lama. Proses panjang sosialisasi ini kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya, kemudian membentuk identifikasi. Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih ini berkaitan dengan fungsi sikap, menurut Greenstein (dalam Nursal, 2004:60) sikap memiliki tiga fungsi yaitu:

“Pertama, fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutannya. Ketiga, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, yaitu sebagai upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis”.

Secara sederhana dalam pendekatan psikologis ini pemilih melakukan identifikasi-identifikasi berdasarkan proses sosialisasi yang telah dilakukan terhadap partai-partai tertentu atau terhadap kandidat peserta pemilu berdasarkan ketokohnya dan kemudian merepresentasikan dirinya terhadap partai atau kandidat peserta pemilu tersebut.

Pendekatan pilihan rasional, pendekatan ini berasal dari teori ekonomi tentang pertimbangan untung rugi yang kemudian dipakai dalam teori politik yang menjelaskan tentang perilaku pemilih dalam pemilu. Menurut James S. Coleman tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan

oleh nilai atau pilihan, teori ini didukung oleh konsep aktor rasional. Yaitu di mana aktor akan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka (Ritzer dan Goodman, 2008:394). Berbeda dengan pendapat Coleman, menurut Dan Nimmo (dalam Nursal, 2004:66) pendekatan rasional menganggap bahwa:

“Para pemilih benar-benar rasional dalam menentukan pilihannya. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai berdasarkan tindakan komunikasi. Dimana pemilih rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup sebelum menentukan pilihannya. Tindakan para pemilih rasional ini bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis”.

Organisasi IPNU dan IPPNU telah berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dan memunculkan perilaku memilih tertentu. Organisasi ini merupakan organisasi keterpelajaran yang menaungi para pemuda NU. IPNU adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, memiliki kegiatan seperti, albanjari, pengkaderan, pondok aswaja, *Try out* bersama dan mengaji tauhid. Dimana kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Tujuan dibentuknya organisasi IPNU adalah untuk membentuk pemuda bangsa atau dalam hal ini adalah pelajar yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari’at islam menurut paham *ahlussunnah wal jama’ah* yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 (PDPRT, 2012:3).

Organisasi IPPNU dibentuk dengan tujuan untuk menyempurnakan kepribadian pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari’at islam menurut paham *ahlussunnah Wal Jama’ah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pasal(9) (PDPRT, 2012:44).

Desember tahun 2015, anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung berpartisipasi dalam Pilkada Sidoarjo tahun 2015, dan Desember tahun 2015 dilaksanakan Pilkada serentak hampir diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali pada wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang sering disebut Pilkada, yaitu



merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, sesuai dengan pasal 7 UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 2005.

Undang-undang, UU No.8 tahun 2015 dalam pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 dikatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan hukum tersebut maka untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan secara serentak hampir diseluruh wilayah Indonesia pada bulan Desember 2015. Pilkada serentak tersebut juga dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, dan wilayah Sidoarjo memiliki empat pasang calon bupati yang telah dipilih oleh masyarakat Sidoarjo pada bulan Desember 2015, yaitu Hadi Sucipto-Abdul Kholik, Usman Ikhsan-Ida Astuti, Saiful Ilah-Nur Ahmat, dan Warih Handono -Imam Sugiri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional dan teori pertukaran. James S. Coleman merupakan salah satu pemikir dari teori pilihan rasional, menurutnya tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan, teori ini didukung oleh konsep aktor rasional. Yaitu dimana aktor akan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ketika aktor dapat menentukan pilihannya dengan melihat sumber daya yang ada maka dapat dikatakan bahwa aktor bertindak secara rasional. Pemilih yang rasional memiliki motivasi, tujuan, dan prinsip dalam menentukan pilihannya (Ritzer dan Goodman, 2008:394).

Teori pilihan rasional menurut Herbert Simon menggunakan pendekatan rasionalitas, yang menggabungkan dimensi ekonomi dan psikologi dengan mengeksplorasi batas-batas rasionalitas individu dan organisasi. Simon membedakan rasionalitas ini menjadi dua yaitu rasional objektif dan rasional subjektif. Rasionalitas objektif berlaku apabila suatu keputusan atau pilihan merupakan perilaku “ yang benar” untuk memaksimalkan nilai-nilai tertentu. Dalam rasionalitas objektif ini terdapat tes untuk mengukur ketepatan suatu

keputusan atau pilihan. Sementara itu rasionalitas subjektif menggabungkan elemen-elemen psikologis dengan pengetahuan aktual pembuat keputusan dengan batas-batas pengetahuan (Ishiyama, 2013:56).

Menurut Downs (dalam Ishiyama, 2013:59), individu dalam arena politik dan pemerintahan dipandu oleh kepentingan diri sendiri ketika mereka menentukan pilihan dengan tingkat utilitas yang tertinggi. Konsep kegunaan (*utility*) tampil menonjol dalam ilmu ekonomi dan merupakan cara umum untuk meringkas pilihan-pilihan keuntungan dalam membuat keputusan, dan konsep utilitas kemudian sering muncul dalam literatur pilihan rasional dalam ilmu politik.

Teori pilihan rasional berasal dari pendekatan rasionalitas yang dikemukakan oleh Coleman, Downs, dan Simon lebih bernilai ekonomis, sementara itu Nimmo (Nursal, 2004:66-67) mengemukakan bahwa pendekatan rasional menganggap para pemilih benar-benar rasional dalam menentukan pilihannya, dimana pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai berdasarkan tindakan komunikasi. Secara hipotesis dapat dikatakan pemilih rasional yang memenuhi syarat Nimmo ini sangat kecil jumlahnya, karena rasionalitas yang terjadi ketika seseorang membeli produk konsumtif amat jarang terjadi ketika ia mempertimbangkan pilihan politiknya (Nursal, 2004:67).

Teori pertukaran juga dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori pertukaran (*Exchange Teori*) berawal dari teori struktural fungsional yang menganggap bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam suatu sistem sosial. Tokoh sosiologi yang pertama kali mengemukakan teori pertukaran ini adalah George C. Homans, menurutnya teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip ekonomis yang elementer, yaitu orang akan menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalanya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Homans juga melihat bahwa tidak semua perilaku sosial merupakan perilaku ekonomis, karena ganjaran yang diterima tidak hanya bersifat ekstrinsik tetapi juga dapat berupa ganjaran intrinsik (Poloma, 2007:59). Ia juga menyatakan bahwa semakin sering seseorang melakukan tindakan dan memperoleh imbalan, maka semakin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut.

Berasal dari teori pertukaran Homans, Peter M. Blau mencoba untuk melengkapi teori pertukaran yang dikemukakan oleh Homans. Dimana Blau berpendapat bahwa tidak semua perilaku manusia dibimbing oleh pertukaran sosial, sehingga ia membuat persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku yang mengarah pada pertukaran sosial, yaitu perilaku harus berorientasi pada

tujuan-tujuan yang dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, serta perilaku tersebut harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan. Tujuan tersebut berupa ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran intrinsik bisa berupa kasih sayang, kehormatan, kecantikan. Sedangkan ganjaran ekstrinsik berupa uang, barang, jasa dan lain sebagainya (Poloma, 2007:81-82). Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “bagaimana kecenderungan perilaku memilih (anggota organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung) dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015?”. Penelitian ini jika dikaji dengan teori pilihan rasional dan teori pertukaran, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku memilih anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif diharapkan peneliti mampu mengumpulkan data-data terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014:7). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan perilaku memilih anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah 19 Pimpinan Ranting (Desa) organisasi IPNU dan IPPNU yang berada di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 170 responden, namun yang memenuhi syarat yaitu anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang telah memiliki hak pilih dan telah memberikan hak suaranya pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015 yaitu sebanyak 135 orang. Berdasarkan taraf kesalahan 1% maka diperoleh sampel sebanyak 116 orang responden, penentuan sampel pada masing-masing ranting/Desa menggunakan teknik *cluster*.

Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku memilih. Definisi operasional variabelnya adalah serangkaian kegiatan sebelum pembuatan keputusan yang dilakukan oleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah angket (kuisisioner) dan dokumentasi. Angket/kuisisioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika diketahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Angket/kuisisioner dapat pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka (Sugiyono, 2014:142).

Penelitian ini menggunakan angket/kuisisioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengetahui perilaku memilih dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 (studi pada anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung). Sedangkan Dokumen-dokumen yang tersedia diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian dan merupakan bagian yang harus ada dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket/kuisisioner dengan 26 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Terdapat 24 pertanyaan yang mencerminkan perilaku memilih dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 (studi pada anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo). Terdapat dua soal terbuka, yaitu satu soal mencerminkan imbalan apa yang didapatkan, dan satu soal untuk menunjukkan siapa calon bupati/wakil bupati yang dipilih oleh anggota organisasi dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 beserta alasannya.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu, mengalisis tiap item soal yaitu dengan mencari persentase responden yang menjawab Ya dan Tidak. Terdapat 24 pertanyaan dengan pilihan jawaban Ya dan Tidak. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan :

F = frekuensi responden yang menjawab Ya/Tidak.  
N = jumlah seluruh responden

Tahap kedua yaitu mengalisis tiap indikator dalam subvariabel pilihan rasional objektif dan subjektif dengan rumus :

$$\text{Skor jawaban} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100$$

Keterangan :  
 Skor Ideal = Skor Max X Jml Pertanyaan X Jml Responden

Dari jumlah skor yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabel interpretasi skor :

Tabel 4. Interpretasi Skor dalam Persen

No.	Persentase	Kategori
1.	81% - 100%	Sangat Tinggi
2.	61% - 80%	Tinggi
3.	41% - 60%	Sedang
4.	21% - 40%	Rendah
5.	0% - 20%	Sangat Rendah

Tahap ketiga yaitu mencari persentase perilaku memilih dengan melihat kecenderungan responden dalam subvariabel pemilih rasional objektif dan pemilih rasional subjektif, rumus yang digunakan adalah rumus persentase yang digunakan pada analisis item soal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan data angket yang diperoleh melalui penelitian, diketahui perilaku memilih anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung pada pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 jika dikaji dengan pendekatan pilihan rasional. Perilaku memilih dengan pendekatan pilihan rasional dibagi menjadi dua yaitu pilihan rasional objektif dan pilihan rasional subjektif. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh terkait perilaku memilih dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 (Studi pada anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo) yang termasuk dalam kategori pemilih rasional objektif adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Informasi Terkait Kandidat Pilkada

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Mengetahui visi dan misi dari masing-masing kandidat peserta Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015	55 (47%)
2.	Mengetahui <i>track record</i> kandidat pilkada Kabupaten Sidoarjo menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan pilihan .	83 (72%)
3.	Mengetahui informasi-informasi tentang semua calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo Th. 2015	50 (43%)
Jumlah Skor		188(54%) Sedang

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 47% anggota IPNU dan IPPNU telah mengetahui visi dan misi dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo tahun 2015 sebelum menentukan pilihannya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota IPNU dan IPPNU

yang memberikan hak suara pada Pilkada Sidoarjo masih banyak yang tidak mengetahui visi dan misi dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo pada saat pemilu berlangsung.

Sebanyak 72% responden mengatakan bahwa mengetahui track record kandidat Pilkada Kabupaten Sidoarjo menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan pilihan dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Banyaknya jumlah responden yang telah mengetahui rekam jejak dari calon bupati dan wakil bupati disebabkan dua dari empat pasang calon bupati dan wakil bupati merupakan *incumbent*, dan satu diantaranya sebelumnya telah menjabat sebagai DPRD Kabupaten Sidoarjo. Data di atas juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 43% anggota IPNU dan IPPNU kecamatan Krembung memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup terhadap seluruh calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo tahun 2015 sebelum menentukan pilihannya. Indikator pertama pilihan rasional objektif ini berada pada kategori sedang.

Tabel 6. Pengambilan Keputusan Saat memilih Kandidat Pilkada

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Memilih calon bupati dan wakil bupati yang berkualitas tanpa didasari partai asal.	77 (66%)
2.	Memilih calon bupati dan wakil bupati yang bukan berasal dari partai dengan basis NU.	83 (72%)
3.	Pilihannya bukan merupakan bentuk loyalitas terhadap calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo.	73 (63%)
Jumlah Skor		233(67%) Tinggi

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 66% responden dapat menentukan pilihannya jika dihadapkan pada alternatif pilihan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Dalam menentukan pilihannya anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung tetap mempertimbangkan kualitas kandidat peserta pemilu tanpa dipengaruhi oleh partai kandidat peserta pemilu tersebut berasal, apakah berasal dari partai nasionalis atau berasal dari partai dengan basis NU. Data tersebut didukung dengan data berikutnya yaitu sekitar 72% anggota IPNU dan IPPNU menyatakan tidak memilih berdasarkan partai kandidat peserta pemilu tersebut berasal, dalam hal ini adalah partai dengan basis NU.

Sebanyak 63% dari seluruh anggota IPNU dan IPPNU yang memberikan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 merasa bahwa pilihannya bukan merupakan bentuk loyalitasnya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilih. Berdasarkan indikator kedua ini dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dapat



menentukan pilihannya bila dihadapkan pada alternatif pilihan dengan tidak dipengaruhi oleh partai pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut berasal, dan berada dalam kategori tinggi.

Tabel 7. Prinsip dalam Menentukan Pilihan

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Anggota IPNU dan IPPNU dapat menentukan pilihannya sendiri pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015.	95 (82%)
2.	Tidak memilih calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh organisasi IPNU dan IPPNU.	64 (55%)
3.	Tidak mengikuti instruksi kelompok dalam menentukan pilihan pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015.	73 (63%)
4.	<i>Reward</i> (hadiah) bukan merupakan pertimbangan yang penting dalam menentukan pilihan pada pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.	82 (71%)
Jumlah Skor		314(68%) Tinggi

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa sebanyak 82% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menyatakan bahwa dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 telah menentukan pilihannya sendiri. Dalam observasi awal memang dijelaskan bahwa walaupun organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memberikan gambaran dan mengarahkan, anggotanya tetap diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam setiap pemilu yang terselenggara. 55% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menyatakan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak didukung oleh organisasi IPNU dan IPPNU. Walaupun anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dapat menentukan pilihannya sendiri. Sebanyak 71% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga menyatakan bahwa *reward* yang diterima bukan merupakan pertimbangan yang penting untuk menentukan pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

*Reward* yang didapatkan anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung sebelum menentukan pilihannya berupa uang dan barang. Dalam teori pertukaran uang dan barang ini termasuk dalam ganjaran ekstrinsik. Ganjaran atau imbalan diberikan dengan maksud agar orang yang menerima ganjaran tersebut bertindak sesuai dengan harapan pemberi ganjaran. Tindakan yang dimaksud disini adalah memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memberi *Reward* tersebut. Berdasarkan indikator ketiga ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki prinsip dalam menentukan pilihannya dan dalam kategori tinggi.

Tabel 8. Penilaian Terhadap Kandidat Pilkada

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Memilih calon bupati/wakil bupati yang memiliki kemampuan yang mumpuni .	100 (86%)
2.	melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap seluruh kandidat peserta Pilkada.	88 (76%)
3.	penilaian didasarkan pada informasi yang didapatkan terkait masing-masing calon bupati dan wakil bupati .	64 (55%)
Jumlah Skor		252 (72%) (Tinggi)

Sebanyak 86% responden menyatakan bahwa memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo yang dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa memimpin wilayah Sidoarjo. Sebanyak 76% anggota IPNU dan IPPNU telah melakukan penilaian terhadap seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo sebelum menentukan pilihannya. Penilaian tersebut didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan serta tindakan komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan, sebanyak 55% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menyatakan demikian. Melakukan penilaian merupakan salah satu kriteria seseorang dikatakan sebagai pemilih rasional yang objektif. Dalam indikator ini anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang melakukan penilaian terhadap seluruh calon bupati dan wakil bupati dalam kategori tinggi.

Tabel 9. Memilih Kandidat Pilkada untuk Kepentingan Umum

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Memilih calon bupati/wakil bupati pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015 karena program-program kerja yang ditawarkan dapat membawa perubahan bagi Kab. Sidoarjo	89 (77%)
2.	Memilih calon bupati dan wakil bupati dengan program kerja yang dapat membangun wilayah Sidoarjo baik secara sosial maupun fasilitas umum.	77 (66%)
Jumlah Seluruh Skor		166 (72%) Tinggi

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 77% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memilih calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015 karena program kerja yang ditawarkan dirasa akan membawa perubahan yang baik bagi kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota IPNU dan IPPNU kecamatan Krembung menghendaki adanya perubahan pada Kabupaten Sidoarjo agar lebih baik lagi. Sementara itu sebanyak 66% responden memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan program kerja yang ditawarkan dapat membangun wilayah Sidoarjo baik secara sosial maupun membangun

dan memperbaiki fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Indikator kelima terkait tujuan dan motivasi anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dapat disimpulkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU kecamatan Krembung memilih calon bupati dan wakil bupati yang dapat membawa perubahan serta membangun wilayah Sidoarjo agar lebih baik lagi. Maka pada indikator ini termasuk dalam kategori tinggi. Dari 116 responden yang termasuk dalam kategori pemilih rasional objektif adalah 43 orang. Persentasenya adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$= \frac{43}{116} \times 100$$

$$= 37\%$$

Berdasarkan lima indikator yang mengukur seseorang yang benar-benar dikatakan sebagai pemilih rasional yang objektif diketahui bahwa tidak ada responden yang benar-benar memenuhi kelima indikator. Maka dalam penentuan apakah responden dalam kategori pemilih rasional yang objektif yaitu dengan melihat kecenderungan responden, yaitu termasuk dalam kategori pemilih rasional yang objektif atau subjektif. Penentuan kecenderungan responden dikatakan pemilih rasional yang objektif atau subjektif dilihat dari jumlah skor yang diperoleh responden, apakah lebih mengarah pada pemilih rasional yang objektif atau subjektif.

Hasil perhitungan skor yang didapat dari masing-masing responden, dalam hal ini adalah anggota IPNU dan IPPNU kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebanyak 37% responden memiliki kecenderungan sebagai pemilih rasional yang objektif. Yaitu dimana anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dapat menentukan pilihannya bila dihadapkan pada alternatif pilihan dengan tidak dipengaruhi oleh partai pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut berasal dan lebih mempertimbangkan pilihan mana yang lebih menunjukkan tingkat preferensi yang lebih tinggi misalnya yaitu kemampuan dan kualitas pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memiliki prinsip dalam menentukan pilihannya dengan menentukan pilihannya sendiri, tidak terpengaruh oleh instruksi kelompok, dan tidak terpengaruh oleh *reward* yang diberikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015.

Dalam acara yang diadakan oleh Panitia Bintang Sembilan terdapat pengarahan pada anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung untuk memilih pasangan calon dari partai dengan basis NU. Walaupun dalam undangan yang disebar, susunan acara adalah *istighotsah* dan *tahlil kubro*, silaturahmi dan sosialisasi hasil muktamar NU ke 33, dan informasi keorganisasian, namun panitia juga melakukan kampanye dengan mengarahkan anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung untuk memilih pasangan calon bupati tertentu. Dalam acara tersebut panitia juga membagikan “dana oprasional” untuk organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU tidak terpengaruh oleh arahan dan instruksi tersebut.

Selain itu sebagian besar anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga melakukan penilaian terhadap seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Memiliki tujuan dan motivasi untuk kepentingan umum juga terlihat pada sebagian besar anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung. Keinginan untuk memiliki pemimpin mampu membawa perubahan serta membangun wiayah Sidoarjo agar lebih baik lagi juga terlihat dari data hasil penelitian yang telah diperoleh. Sebagian anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memiliki informasi terkait seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Namun tidak ada responden yang memiliki nilai maksimal dalam subvariabel pilihan rasional objektif, masih terlihat sisi subjektifitasnya.

Nimmo mengemukakan bahwa pendekatan rasional menganggap para pemilih benar-benar rasional dalam menentukan pilihannya, dimana pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai berdasarkan tindakan komunikasi. Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan masing-masing calon bupati dan wakil bupati adalah sarana bagi pemilih untuk mengenal bagaimana calon pemimpin wilayahnya, yaitu melalui visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat peserta pemilu. Melalui komunikasi dan sosialisasi tersebut pemilih akan benar-benar melakukan penilain sebelum menentukan pilihannya.

Berpedoman pada UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No.1 tahun 2014 pada pasal 3 pelaksanaan Pilkada dilaksanakan secara serentak hampir diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali dengan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan Pilkada tahun 2015, Kabupaten Sidoarjo memiliki empat pasang calon bupati dan wakil bupati yaitu Hadi Sucipto-



Abdul Kholik, Usman Ikhsan-Ida Astuti, Saiful Ilah-Nur Ahmat, dan Warih Handono-Imam Sugiri.

Melalui komunikasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, pemilih dalam hal ini adalah anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung melakukan penilaian sebelum menentukan pilihannya untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati mana yang dirasa akan membawa perubahan untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo agar lebih baik lagi baik secara sosial maupun infrastruktur. Untuk dapat melakukan penilaian secara valid tentu informasi dan pengetahuan yang lengkap terkait masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dimiliki oleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung untuk memenuhi syarat Nimmo sebagai pemilih rasional yang objektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak ada anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang mendapatkan nilai maksimal pada subindikator pilihan rasional objektif. Hal ini juga didukung oleh hipotesis Nursal dalam bukunya, menurutnya pemilih rasional yang memenuhi syarat Nimmo sangat kecil jumlahnya, karena rasionalitas yang terjadi ketika seseorang membeli produk konsumtif (kandidat peserta pemilu) amat jarang terjadi ketika ia mempertimbangkan pilihan politiknya (Nursal, 2004:67).

Pemilih yang memiliki kecenderungan sebagai pemilih rasional objektif masih menunjukkan sisi subjektifnya, walaupun yang lebih dominan adalah objektivitasnya. Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang memiliki kecenderungan sebagai pemilih rasional objektif lemah dalam hal informasi dan pengetahuan terkait masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo tahun 2015, karena sebagian dari Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung tidak memiliki informasi yang cukup terkait calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebagian responden untuk memilih calon bupati dan wakil bupati dilakukan berdasarkan pada informasi yang tidak lengkap.

Informasi yang diterima tidak lengkap, responden benar-benar melakukan penilaian terhadap seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo dan mengambil keputusan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terbaik. Pada pertanyaan esay, anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memberikan alasan yang rasional mengapa mereka memberikan hak suaranya pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya tersebut. Walaupun

banyak diantara mereka yang memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati dari partai dengan basis NU.

Alasan yang mereka berikan dalam memilih calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo yang berasal dari partai dengan basis NU terkait kualitas dan kemampuan calon bupati dan wakil bupati. Yaitu berkaitan dengan *track record* dari pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut yang dianggap baik, mampu membawa perubahan untuk wilayah Sidoarjo dan sudah terbukti, karena telah memimpin sebelumnya, memiliki kinerja yang baik selama memimpin wilayah Sidoarjo sebelumnya, dan lain sebagainya. Subvariabel kedua adalah pemilih rasional subjektif. Terdapat empat indikator yang dijadikan sebagai alat ukur dalam subvariabel pemilih rasional subjektif ini. Berikut adalah indikator dalam subvariabel pemilih rasional subjektif:

Tabel 10. Memilih Kandidat Pilkada untuk Kepentingan Pribadi

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Terdapat kepentingan atau tujuan kelompok dalam penentuan pilihan pada calon bupati dan wakil bupati	62 (53%)
2.	Memilih calon bupati/wakil bupati dengan tujuan jika kandidat peserta pemilu tersebut menjabat sebagai bupati/wakil bupati akan ingat pada kelayakan anggota/organisasi (IPNU dan IPPNU)	69 (59%)
3.	Memilih partai yang berbasis NU akan membantu menjaga stabilitas kader-kader NU yang ada di pemerintahan.	72 (62%)
Jumlah Skor		203(58%) Sedang

Data di atas menunjukkan bahwa 53% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memilih calon bupati dan wakil bupati karena memiliki tujuan atau kepentingan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh James S. Coleman dalam teori pilihan rasionalnya menyatakan bahwa tindakan perseorangan akan mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan dimana aktor dalam hal ini adalah anggota IPNU dan IPPNU kecamatan Krembung akan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan kebutuhan mereka, baik itu secara individu maupun kelompok.

Sebanyak 59% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo dengan maksud jika kandidat yang dipilihnya tersebut menjabat akan ingat pada kelayakan anggota/organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung. Sementara itu sebanyak 62% tetap memilih calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari partai NU walaupun kurang kompeten, karena memiliki tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas kader NU yang ada di pemerintahan. Berdasarkan data di atas dapat

disimpulkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki tujuan dan kepentingan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.

Tabel 11. Memaksimalkan Keuntungan

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Memilih calon bupati/ wakil bupati yang memberikan keuntungan paling banyak bagi organisasi IPNU dan IPPNU.	64 (55%)
2.	Memilih calon bupati/ wakil bupati yang banyak memberikan kontribusi/ sumbangsih pada organisasi NU dan banomnya.	74 (64%)
Jumlah Skor		138 (58%) Sedang

Memaksimalkan keuntungan (*utility*) dalam memilih calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Sidoarjo tahun 2015 termasuk dalam pendekatan pilihan rasional. Menurut James S. Coleman ketika aktor, dalam hal ini adalah anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menentukan pilihannya dengan melihat sumber daya yang ada maka dapat dikatakan bahwa aktor tersebut bertindak secara rasional. Jika keuntungan tersebut bernilai ekonomis maka termasuk dalam pemilih rasional yang subjektif.

Tabel 11 menunjukkan sebanyak 55% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memilih calon bupati dan wakil bupati dengan pertimbangan kandidat tersebut memberikan keuntungan paling banyak bagi organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung. Dan sebanyak 64% responden menyatakan bahwa memilih kandidat peserta pemilu yang banyak memberikan kontribusi/sumbangsih kepada organisasi NU dan banomnya. Karena menurut Anthony Downs dalam teori pilihan rasional dalam arena politik dan pemerintahan individu atau kelompok akan dipandu oleh kepentingan pribadi ketika mereka menentukan pilihan dengan tingkat *utilitas* yang tertinggi. Pada indikator pertama pilihan rasional subjektif ini termasuk dalam kategori sedang.

Tabel 12. Keterbatasan Anggota IPNU dan IPPNU terhadap Informasi Kandidat Pilkada

No.	Pertanyaan	Jml. Responden
1.	Informasi yang dapatkan hanya terkait pada kandidat peserta Pilkada yang berasal dari partai dengan basis NU.	57 (49%)
2.	Tidak mengetahui visi dan misi dari masing-masing kandidat peserta Pilkada Kabupaten Sidoarjo .	61 (53%)
3.	Tidak mengetahui informasi-informasi tentang semua calon bupati dan wakil bupati.	66 (57%)
Jumlah Skor		184 (53%) Sedang

Tabel 12 menyatakan bahwa sebanyak 49% responden hanya mendapatkan informasi hanya terkait

calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari partai NU. 53% anggota IPNU dan IPPNU tidak mengetahui visi dan misi dari seluruh calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa anggota IPNU dan IPPNU yang memberikan hak suara pada Pilkada Sidoarjo masih banyak yang tidak mengetahui visi dan misi dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo pada saat pemilu berlangsung. 57% anggota IPNU dan IPPNU memiliki informasi dan pengetahuan yang terbatas terhadap seluruh calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo sebelum menentukan pilihannya. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini adalah memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan keterbatasan informasi.

Tabel 13. Pertimbangan Untung dan Rugi

No.	Pertanyaan	Jml Responden
1.	Memilih calon bupati/wakil bupati didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi yang akan didapatkan.	42 (36%)
2.	Keuntungan yang didapatkan dari calon bupati dan wakil bupati mempengaruhi pilihan dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.	48 (41%)
3.	Merasa rugi jika calon bupati dan wakil bupati yang anda pilih tidak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sidoarjo	53 (46%)
Jumlah Skor		143 (41%) Sedang

Sebanyak 36% anggota IPNU dan IPPNU menyatakan bahwa ia memilih dengan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan didapatkan jika pilihannya tersebut menjabat sebagai bupati dan wakil bupati untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. 41% responden menyatakan bahwa keuntungan yang didapatkan mempengaruhi pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Keuntungan yang diperoleh anggota IPNU dan IPPNU sebelum menentukan pilihannya berupa uang dan barang.

Berdasarkan data di atas imbalan yang diperoleh tersebut mempengaruhi 41% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. 46% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menyatakan rugi jika calon bupati dan wakil bupati yang dipilih tidak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021. Ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo keuntungan berupa ganjara instrinsikan didapatkan. Secara tidak langsung anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung merasakan kemudahan-kemudahan secara administratif dengan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan, serta mendapatkan

perlakuan istimewa dengan dilibatkannya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dari 116 responden yang termasuk dalam kategori pemilih rasional subjektif sebanyak 16 orang. Berikut adalah persentasenya:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$= \frac{16}{116} \times 100$$

$$= 14\%$$

Pendekatan pilihan rasional subjektif menggabungkan dimensi ekonomi dan psikologis dengan mengeksplorasi batas-batas individu dan organisasi. Seseorang yang tergabung dalam organisasi tertentu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan orang tersebut, misalnya dalam hal pilihan politiknya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian terdapat 14% anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam kategori pemilih rasional yang subjektif. Terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk melihat anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam pemilih rasional yang subjektif, yaitu memiliki tujuan dan kepentingan individu maupun kelompok dalam menentukan pilihan politiknya, memaksimalkan keuntungan, informasi terkait kandidat peserta pemilu terbatas, serta terdapat pertimbangan untung dan rugi dalam penentuan pilihan politiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung 14% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki tujuan dan kepentingan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Tujuan dan kepentingan tersebut berkaitan dengan harapan bahwa jika pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya tersebut menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo akan ingat pada kelayakan organisasi IPNU dan IPPNU. Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memberikan hak suaranya kepada kader NU dengan tujuan jika calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya menjabat akan menjaga stabilitas kader NU di pemerintahan.

Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terhadap calon bupati dan wakil bupati mana yang akan dipilih, anggota IPNU dan IPPNU memiliki keterbatasan informasi terkait seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Sementara itu pertimbangan keuntungan juga melatar belakangi pengambilan keputusan anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam kategori pemilih rasional yang subjektif, yaitu ketika pasangan calon

bupati dan wakil bupati yang dipilih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo maka keuntungan berupa ganjaran insentif didapatkan.

Pendekatan pilihan rasional subjektif menggabungkan dimensi ekonomi dan psikologi dengan mengeksplorasi batas-batas individu dan organisasi. Seseorang yang tergabung dalam organisasi tertentu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan orang tersebut, karena terjadi interaksi antara anggota organisasi satu dengan yang lain, misalnya dalam hal pilihan politiknya. Teori pertukaran juga digunakan untuk menganalisis pendekatan pilihan rasional subjektif ini. Teori pertukaran menjelaskan bahwa setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam suatu sistem sosial.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, organisasi IPNU dan IPPNU juga memiliki peran dalam kegiatan politik. Organisasi IPNU dan IPPNU merupakan salah satu banom NU, dan NU adalah organisasi sosial keagamaan yang tidak jarang dimanfaatkan untuk meraih suara pada saat menjelang pemilu. Sudah memahami hal tersebut maka salah satu banom NU ini, yaitu organisasi IPNU dan IPPNU juga memiliki motif dalam memberikan hak suaranya untuk kandidat peserta pemilu tertentu.

Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan mereka. Untuk itu pertimbangan keuntungan akan digunakan dalam menentukan pilihannya pada pemilu yang terselenggara. Hak suara yang diberikan kepada salah satu kandidat peserta pemilu harus memiliki nilai tukar agar memberikan keuntungan pada masing-masing pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian terdapat 14% anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam kategori pemilih rasional subjektif.

Berdasarkan data yang diperoleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki tujuan dan kepentingan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Tujuan dan kepentingan tersebut berkaitan dengan harapan bahwa jika pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya tersebut menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo akan ingat pada kelayakan organisasi IPNU dan IPPNU. Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung juga memberikan hak suaranya kepada kader NU dengan tujuan jika calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya menjabat akan menjaga stabilitas kader NU di pemerintahan.

Anthony Downs dalam teori pilihan rasional berpendapat bahwa dalam arena politik dan pemerintahan, individu atau kelompok akan dipandu oleh kepentingan pribadi ketika mereka menentukan pilihan



dengan tingkat *utilitas* yang tertinggi. Hal ini dapat terlihat pada anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam kategori pilihan rasional yang subjektif, dimana anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang termasuk dalam kategori ini memilih pasangan calon yang memberikan keuntungan paling banyak, serta memilih pasangan calon yang memberikan banyak kontribusi pada organisasi NU dan banom-banomya.

Pengambilan keputusan yaitu untuk menentukan pilihan terhadap calon bupati dan wakil bupati mana yang akan dipilih, anggota IPNU dan IPPNU memiliki keterbatasan informasi terkait seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Sementara itu pertimbangan keuntungan juga melatar belakangi pengambilan keputusan anggota IPNU dan IPPNU yang termasuk dalam kategori pemilih rasional yang subjektif, yaitu ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo maka keuntungan berupa ganjaran intrinsik dan ekstrinsik akan didapatkan.

Ganjaran intrinsik ini secara tidak langsung dirasakan oleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung. Misalnya kemudahan-kemudahan secara administratif dengan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan, serta mendapatkan perlakuan istimewa dengan dilibatkannya dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai individu yang tergabung dalam kelompok atau organisasi pertimbangan untung rugi wajar untuk dilakukan karena memiliki nilai tukar. Dalam hal ini anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung sebagai penyedia barang atau jasa berharap memperoleh imbalan barang atau jasa yang diinginkannya atau dibutuhkannya. Sedangkan ganjaran ekstrinsik bisa langsung diterima oleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yaitu berupa uang dan barang yang diterimanya pada masa kampanye.

Organisasi ini yang memiliki massa yang banyak, dan dimanfaatkan oleh kandidat peserta pemilu untuk memperoleh tambahan suara. Oleh sebab itu dengan pertimbangan keuntungan dan kepentingan individu ataupun kelompok maka 14% dari anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang telah memiliki hak suara dan telah menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 memberikan hak suaranya pada kandidat peserta pemilu yang paling banyak menguntungkan untuk dirinya ataupun kelompoknya. Kategori pemilih ketiga yaitu pemilih dengan pendekatan Psikologis, yaitu dimana anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki nilai sama tinggi pada kedua subvariabel (rasional objektif dan

rasional subjektif) atau memiliki nilai sama rendah pada kedua subvariabel tersebut. Dari 116 responden yang termasuk dalam pemilih dengan pendekatan psikologis sebanyak 57 orang. Persentase responden yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$P = \frac{57}{116} \times 100$$

$$= 49\%$$

Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang termasuk dalam pemilih yang menggunakan pendekatan Psikologis, yaitu sekitar 49%. Pemilih dalam kategori ini memiliki nilai yang sama besar yaitu diatas 50 dalam kedua subvariabel atau yang memiliki nilai sama rendah yaitu dibawah 50 pada kedua subvariabel. Artinya terdapat responden yang memilih calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin wilayah Kabupaten Sidoarjo dan mengharapkan calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya tersebut dapat membawa perubahan baik pada wilayah Kabupaten Sidoarjo, namun juga memiliki pertimbangan apa yang akan didapatkan jika calon bupati dan wakil bupati yang dipilih terpilih, baik untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya (organisasi IPNU dan IPPNU).

Selain terdapat responden dengan nilai yang sama besar pada kedua subvariabel juga terdapat responden yang memiliki nilai sama rendah pada kedua subvariabel. Artinya pemilih tersebut menentukan pilihannya tidak didasarkan pada pertimbangan kemampuan dan kualitas calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya, juga tidak mempertimbangkan keuntungan apa yang didapatkan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan hak suara tanpa dilatar belakangi kepentingan kelompok ataupun memilih calon bupati dan wakil bupati yang terbaik untuk bisa memimpin wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pemilih yang termasuk dalam kategori ini sebanyak 49% orang. Individu yang memiliki ikatan dengan kelompok atau organisasi tertentu dapat mempengaruhi pembuatan keputusan individu tersebut. Telah dilakukan penilaian pada dua subvariabel untuk melihat perilaku pemilih, yaitu anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015. Pada pemilih yang memiliki nilai sama tinggi pada kedua subvariabel, ia menentukan pilihan dengan

pertimbangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin wilayahnya dan juga anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung sebagai pemilih memiliki kepentingan dan tujuan baik itu secara pribadi maupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu. Kategori pemilih ini menggabungkan dimensi kepentingan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

Pemilih yang memiliki nilai sama tinggi pada kedua subvariabel dapat dikategorikan sebagai pemilih yang menggunakan pendekatan Psikologis. Yaitu pemilih melakukan identifikasi-identifikasi terhadap partai atau kandidat peserta pemilu yang kemudian merepresentasikan dirinya terhadap partai atau kandidat peserta pemilu tersebut. Dalam hal ini anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi terkait kandidat peserta pemilu, berdasarkan informasi yang diterima tersebut akan terbentuk ikatan yang kuat dengan partai atau tokoh dan kemudian membentuk identifikasi.

Terbentuknya identifikasi pemilih terhadap partai atau kandidat peserta pemilu ini berkaitan dengan fungsi sikap dalam pendekatan Psikologi. Greenstein menjelaskan tiga fungsi sikap tersebut, pertama adalah fungsi kepentingan, dari informasi yang didapat anggota IPNU dan IPPNU menilai kandidat peserta pemilu berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Fungsi sikap yang kedua adalah penyesuaian diri, yaitu dimana anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung menyesuaikan diri untuk mengambil keputusan yang sama atau tidak dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, yaitu sebagai upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis jika pilihannya berbeda dengan pilihan kelompoknya, karena ia harus menentukan pilihan sesuai dengan kelompoknya. Pendekatan Psikologis melihat seorang pemilih yang memiliki motivasi, tujuan dan prinsip dalam menentukan pilihannya baik itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang memiliki kemampuan dan kualitas berdasarkan informasi yang didapatkan dari tindakan sosialisasi dan komunikasi dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo. Ketua IPPNU Kecamatan Krembung juga mengatakan :

“Tentunya kita memilih calon bupati dan wakil bupati yang terbaik untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, tetapi jika kita juga mendapatkan keuntungan dari pilihan kita itu, mengapa tidak. Ibaratnya kita tidak hanya dapat pemimpin yang

baik, tetapi juga menguntungkan untuk organisasi”.

Anggota IPNU dan IPPNU yang memiliki nilai sama rendah pada kedua subvariabel memiliki pertimbangan yang rendah dalam penentuan pilihannya baik itu pada kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh calon bupati dan wakil bupati yang dipilihnya atau pada tujuan dan kepentingan individu maupun kelompoknya yang merupakan salah satu banom NU, dalam hal ini adalah organisasi IPNU dan IPPNU. Pemilih dalam kategori ini juga tidak dapat dikatakan sebagai pemilih yang menentukan pilihannya dengan cara asal memilih, karena mereka melakukan pertimbangan pada kedua subvariabel namun pertimbangan tersebut tidak maksimal dilakukan, sehingga nilai pada kedua subvariabel pilihan rasional sama rendahnya.

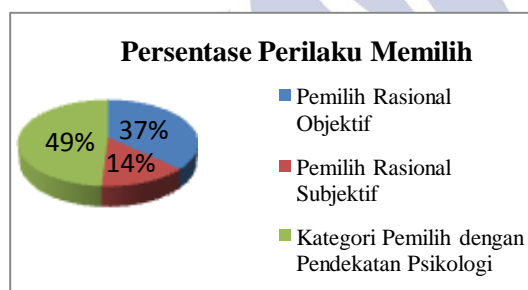
Pemilih yang memiliki nilai sama rendah pada kedua subvariabel ini dalam pendekatan Psikologis memilih berdasarkan ketokohan kandidat peserta pemilu. Sehingga pemilih tidak peduli dengan program kerja yang ditawarkan, visi dan misi serta tidak mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, karena menentukan pilihan berdasarkan sosok tokoh yang dipilihnya tersebut. Faktor emosional yang terbentuk berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan mempengaruhi anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam menentukan pilihan pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo, yaitu berdasarkan identifikasi ketokohan.

Gerungan (dalam Nursal, 2004:59-60) menyebutkan bahwa identifikasi merupakan dorongan untuk identik dengan orang lain yang dianggap ideal dalam suatu segi, sehingga faktor ketokohan juga berpengaruh kuat dalam membentuk perilaku pemilih. Pada identifikasi ketokohan ini, pemilih melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon bupati dan wakil bupati, serta tokoh di belakang pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih. Sehingga anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang memiliki nilai rendah pada kedua subvariabel dapat menentukan pilihannya dengan memilah ketokohan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau dengan memilah ketokohan dari tokoh NU yang dijadikan sebagai panutan atau dihormati oleh anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang memberikan hak suaranya pada pasangan calon bupati dan wakil bupati Saiful Ilah dan Nur Ahmat, lebih banyak memilah sosok Saiful Ilah yang sebelumnya telah menjabat sebagai bupati Sidoarjo. Dalam kurun

waktu lima tahun anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung melakukan identifikasi pada identitas Saiful Ilah, sehingga pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 terdapat anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang menentukan pilihannya berdasarkan ketokohan dari kandidat peserta pemilu. Dari jawaban angket dengan pertanyaan terbuka terdapat anggota IPNU Kecamatan Krembung yang memiliki nilai sama rendah memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidoarjo dengan alasan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut merupakan “Syehker Mania”.

Dari 49% responden yang termasuk dalam kategori ini, 37% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki nilai sama besar pada kedua subvariabel yaitu subvariabel rasional objektif dan rasional subjektif, dan 12% yang lain memiliki nilai yang sama rendah pada kedua subvariabel. Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung yang termasuk dalam pemilih dengan pendekatan rasional objektif dan pendekatan psikologis dengan nilai yang sama pada kedua subvariabel memiliki jumlah yang sama yaitu 37%.



Gambar 1 Persentase Perilaku Memilih

Analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung terbagi dalam tiga kategori yaitu kategori pemilih rasional objektif, kategori pemilih rasional subjektif dan kategori pemilih dengan pendekatan psikologi. Ini artinya anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung adalah pemilih yang variatif. Seorang yang tergabung dalam kelompok atau organisasi tertentu dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya, misalnya pada saat penentuan pilihannya pada pemilu yang terselenggara. Melalui interaksi yang dilakukan oleh antar anggota, tokoh panutan dalam kelompok, serta instruksi dari kelompok dapat mempengaruhi perilaku memilih individu yang tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi. Namun sebagai individu yang tergabung dalam suatu kelompok, anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki perilaku memilih yang variatif, yaitu sebagai pemilih rasional objektif, rasional subjektif, dan pemilih dengan pendekatan psikologis.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka penelitian yang berjudul “Perilaku Memilih dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 (Studi pada Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)” dapat disimpulkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung adalah pemilih yang variatif. Sebanyak 37% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam pemilih rasional yang objektif. Sementara itu sebanyak 14% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung termasuk dalam pemilih rasional subjektif.

Sebanyak 49% anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung dalam kategori pemilih yang menggunakan pendekatan psikologi, yaitu dimana pemilih memiliki pertimbangan terkait kualitas dan kemampuan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan informasi yang diterimanya melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi dan kemudian melakukan identifikasi, serta memiliki tujuan dan kepentingan kelompok dalam memberikan hak suaranya. Pemilih kategori ini juga melakukan identifikasi ketokohan pada sosok kandidat peserta Pilkada atau tokoh panutan yang berada di belakang kandidat peserta Pilkada Sidoarjo tahun 2015.

### Saran

Sebagai individu yang tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu, anggota IPPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung telah melakukan serangkaian kegiatan sebelum menentukan pilihannya pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung memiliki perilaku memilih yang variatif. Walaupun tergabung dalam suatu organisasi anggota IPNU dan IPPNU menentukan pilihannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu baik itu untuk kemajuan wilayah Sidoarjo maupun untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung telah mendapatkan gambaran dan arahan terkait salah satu kandidat peserta Pilkada Kabupaten Sidoarjo yang telah banyak berkontribusi bagi organisasi NU. Sebagai anggota organisasi tujuan dan kepentingan kelompok merupakan hal yang penting, namun dalam pelaksanaan pemilu anggota IPNU dan IPPNU sebaiknya dapat memisahkan antara kepentingan kelompok dan kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kualitas dan kemampuan. Oleh sebab itu sebagai organisasi yang memiliki tujuan dan kepentingan sebaiknya mendahulukan pertimbangan untuk memilih



pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi wilayahnya kearah yang lebih baik lagi. Serta organisasi IPNU dan IPPNU merupakan organisasi keterpelajaran maka lebih baik fokus pada kegiatannya dibidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

[http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014\\_Perolehan-suara\\_parpol.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/952014_Perolehan-suara_parpol.pdf). Diunduh tanggal 03 Maret 2016.

[http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf). Diunduh Tanggal 03 Maret 2016.

Ishiyama, T. John dan Breuning, Marijke. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*. Terjemahan Ahmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Noor, Acep Zamzam, dkk. 2012. *Dari Kiai Kampung Ke NU Miring : Aneka Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PC. IPNU-IPPNU Sidoarjo. 2012. *Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga*. Sidoarjo: PC. IPNU Sidoarjo.

Poloma, M. Margaret. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George dan Goodman, J. Douglas.. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan : Alimandan. Jakarta : Kencana.

Shobacha, Nurul. 2012. *Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru*. Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01, Juni 2012.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.